

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dari rangkaian pembangunan Kabupaten Wonosobo, yang berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dengan visi “ Terwujudnya Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri, dan Sejahtera untuk Semua”. Dari visi tersebut terlihat secara jelas arah tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yaitu terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di segala bidang yang akan diraih melalui pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menjabarkan visi tersebut dalam kerangka operasional, maka diuraikan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan, melalui pelaksanaan program kerja pemerintah daerah selama lima tahun. Adapun hubungan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 :

Tabel IV.1
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara			
Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan	1	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Indeks Demokrasi
	2	Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Indeks Toleransi
	3	Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong	Indeks Gotong Royong
	4	Meningkatnya	Indeks Rasa Aman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat reformasi birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.	1 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 3: Meningkatkan kemandirian daerah		
Meningkatkan produktivitas, Kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas daerah	1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 3. Nilai Tukar Petani 4. Laju Inflasi 5. Pertumbuhan Ekonomi 6. Indeks ketahanan pangan
	2 Meningkatnya daya saing daerah	1. Produktivitas daerah 2. PDRB per kapita (juta rupiah) 3. Indeks kapasitas fiskal daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata		
Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	1. Terpenuhiya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Rata – rata lama sekolah 3. Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-45 tahun 4. Rata – rata usia harapan hidup 5. Angka kematian ibu 6. Angka kematian bayi 7. Prevalensi balita gizi kurang 8. Prevalensi balita gizi buruk 9. Persentase KK yang mendapatkan akses sanitasi dasar 10. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang
	2. Terpenuhiya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak 4. <i>Total Fertility Rate (TFR)</i> 5. <i>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</i> 6. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran 7. Presentase Penduduk Ber KTP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	3 Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	1. Indeks Gini 2. Indeks Wiliamson
	4 Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	1. Persentase angka kemiskinan 2. Indeks kedalaman kemiskinan 3. Indeks keparahan kemiskinan
	5 Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 3. Rasio Ketergantungan (<i>Dependency Ratio</i>) 4. Tingkat Kesempatan Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah		
Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok dan	1 Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	1. Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 2. Ketaatan terhadap RTRW
	2 Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan keseimbangan dan keadilan.	1. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
antar generasi.	3 . Meningkatkan upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	1. Indeks Resiko Bencana

Tabel IV.2
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.a. Meningkatkan nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Peningkatan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik serta menciptakan iklim demokrasi
	Penguatan implementasi kebijakan pelaksanaan Wonosobo Ramah HAM	Meningkatkan kesadaran tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM
1.b. Meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Meningkatkan peran lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan dalam menjaga toleransi dan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat
		Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan bidang keagamaan
		Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang mendukung toleransi dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan
1.c. Meningkatkan semangat dan budaya gotong royong	Meneguhkan kembali budaya gotong royong sebagai sikap hidup masyarakat	Memperkuat pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dengan menempatkan penduduk sebagai basis sentral pembedayaan dan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		prioritas pembangunan
1.d .Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Penguatan pranata sosial dan pengembangan kemitraan berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini	Memperkuat pranata sosial melalui kemitraan pemerintah, lembaga dan masyarakat untuk ketertiban dan keamanan
	Transformasi kebijakan fungsi penegakan Perda	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif
		Mengembangkan metode penegakan Perda secara lebih partisipatif
	Pengembangan sistem pendukung untuk penanganan gangguan keamanan dan peningkatan ketangguhan masyarakat	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan komunitas untuk menjaga stabilitas, ketentraman, dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani	Revitalisasi fungsi perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Membangun data basis terintegrasi sebagai sistem penopang perencanaan
		Menguatkan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif
	Penataan dan penguatan organisasi dan	Membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	tatalaksana	Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien
	Penataan Manajemen SDM	Membangun sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
	Mewujudkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif	Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi
	Membangun dan mengembangkan sistem prosedur serta tata kerja birokrasi untuk meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat	Mengembangkan sistem penopang pemerintahan dan birokrasi berbasis TIK
		Peningkatan kemudahan dan akses layanan melalui pelayanan terpadu
	Menguatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan profesional
		Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
		Mengembangkan layanan informasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi
		Mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan untuk menunjang akuntabilitas
		Mengembangkan birokrasi yang egaliter dan berintegritas
	Peningkatan harmonisasi dan kemitraan penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan kemitraan hubungan dengan beberapa elemen pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan
3.a. Meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan	Peningkatan Kualitas tenaga kerja	Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan tata kelola lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
		Mengembangkan pelatihan kerja berbasis vokasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha
	Peningkatan dan pengembangan pertanian terpadu	Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
		Meningkatkan produksi hasil peternakan dan populasi ternak
		Meningkatkan kelembagaan pertanian
	Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pemberdayaan petani ikan	Meningkatkan produksi perikanan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Peningkatan dan pengembangan ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur pertanian	Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan input produksi
		Meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan ekonomi
	Peningkatan kualitas produk daerah	Mengembangkan ekspor dan meningkatkan mutu komoditas ekspor
		Mengembangkan industri hulu hilir
	Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM	Menciptakan iklim usaha yang kondusif
	Peningkatan ketahanan pangan daerah	Meningkatkan kemandirian pangan
		Mendorong konsumsi pangan lokal yang mendukung usaha pertanian
3.b. Meningkatnya daya saing daerah	Penciptaan iklim kreatif, inovatif dan jiwa kewirausahaan yang berorientasi kemajuan	Mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi berkelanjutan
		Mengarahkan litbang daerah sebagai salah satu penopang kemandirian daerah
		Mewujudkan Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (<i>agro-eco-culture-tourism</i>)
	Peningkatan kapasitas fiskal	Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah
		Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan pengembangan ekonomi	Meningkatkan kemudahan, perlindungan dan kepastian berusaha
		Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan investasi
	Peningkatan karakter berprestasi dan mandiri serta menghargai nilai budaya	Meningkatkan budaya baca dan cerdas bermedia
		Menumbuhkan budaya olahraga dan berprestasi masyarakat
		Menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dan identitas Wonosobo
4.a Terpenuhi layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Percepatan pemenuhan layanan dasar pendidikan bagi masyarakat	Meningkatkan dan pemeratakan akses layanan pendidikan formal dan non formal secara berkeadilan
		Meningkatkan mutu layanan pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan sekolah inklusi
		Meningkatkan manajemen tata kelola pendidikan
		Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi penduduk usia dewasa
	Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan
		Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan mutu tenaga

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		kesehatan
		Meningkatkan mutu dan cakupan jaminan kesehatan
		Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan keluarga dalam memelihara kesehatan
	Pemenuhan layanan dasar sosial bagi masyarakat	Menyelenggarakan perlindungan sosial secara komprehensif
		Memperkuat peran kelembagaan sosial
	Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat	Menurunkan angka kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (<i>backlog</i>)
		Manajemen lingkungan dan mempercepat cakupan dan kualitas sanitasi di kawasan pemukiman
		Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
	Pemenuhan layanan dasar Pekerjaan Umum bagi masyarakat	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, drainase dan irigasi)
4.b. Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Meningkatkan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
	Peningkatan kesetaraan, keadilan gender dan pemenuhan hak anak	Mengarusutamakan gender dan hak anak dalam pembangunan
		Meningkatkan kapasitas perempuan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Pemenuhan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan, pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
		Mengembangkan model pendidikan ramah anak
	Optimalisasi pengendalian kuantitas dan persebaran penduduk melalui pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga	Meningkatkan kualitas dan pemerataan akses layanan KB
		Meningkatkan ketahanan serta kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan dan partisipasi
		Peningkatan KIE dan peran peer to peer grup remaja dalam peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dan pencegahan HIV/AIDS
	Penjaminan pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan adminduk capil	Memperluas akses dan prosedur pelayanan adminduk dan capil
4.c. Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Penguatan kepastian hukum terhadap hak - hak tanah	Penataan administrasi pertanahan terhadap lahan-lahan aset negara sebagai salah satu sumber daya pembangunan
		Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
		Memperbesar aksesibilitas wilayah
	Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis kawasan	Pengembangan pusat pertumbuhan
		Menciptakan desa pusat pertumbuhan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penataan sistem transportasi	Mengembangkan sistem transportasi yang efisien tataran transportasi lokal (tatralok)
		Menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang layak
4.d. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu	Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat miskin/kurang mampu
		Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masy miskin dan kurang mampu
4.e. Berkembangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja	Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan akses dan peluang kesempatan kerja	Peningkatan akses ketrampilan serta optimalisasi pengelolaan aset masy miskin dan sumberdaya lokal
		Meningkatkan akses informasi, peluang dan kapasitas tenaga kerja terutama bagi masyarakat kelompok rentan
	Peningkatan akses terhadap sarana prasarana pendukung ekonomi	Meningkatkan kemudahan akses permodalan termasuk berbagai skema kredit untuk usaha mikro dan rumah tangga
	Penguatan pemberdayaan masyarakat	Mereformulasi upaya pemberdayaan masyarakat berbasis kekuatan dan potensi untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif desa
		Menerapkan <i>One District One Product (ODOP)</i> dan <i>One Village One Product (OVOP)</i> sebagai basis pengembangan potensi

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		lokal
5.a Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan	Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan	Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipatif dan berkeadilan
		Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup
		Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam <i>assessment program</i>
	Meningkatkan pengelolaan persampahan secara partisipatif	Meningkatkan Partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan persampahan
	Penerapan ekonomi hijau (<i>green economy</i>) sebagai salah satu prinsip pembangunan	Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan
	Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan	Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keaneragaman hayati secara berkelanjutan
5.b. Berkembangnya pemanfaatan energi dan energi	Peningkatan ketersediaan energi	Peningkatan eletrifikasi rumah tangga

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
baru/terbarukan berdasarkan prinsip keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan;	Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi	Optimalisasi Pemanfaatan sumber- sumber energi alternatif untuk energi baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi yang menerapkan prinsip hemat energi
5.c. Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Peningkatan kemampuan adaptasi dan upaya mitigasi bencana	Pengurangan resiko bencana

B. Prioritas Pembangunan 2019

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2015-2019. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut “Nawa Cita”, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar Jawa, dan kawasan timur.

Ketiga dimensi tersebut perlu didukung oleh kondisi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi. Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8%;
2. Laju inflasi sebesar 3,5%
3. PDB per kapita sebesar Rp. 72.217 ribu
4. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0 – 8,0%
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,98
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,0-5,0%

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2019 merupakan tahun kelima dari RPJMN Tahun 2015-2019. Program pembangunan nasional untuk pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yaitu “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;
 4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air;
 5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum
2. Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah periode tahun 2018 – 2023 dengan penetapan RPJMD Tahun 2018 – 2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah penyusunan RKPD Tahun 2019 memperhatikan RPJMN 2015 – 2019 serta arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2019.

Mendasarkan RPJPD Tahun 2015 – 2025 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2019 diarahkan untuk pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah berlandaskan pada sumber daya manusia yang semakin berkualitas, pelayanan dasar yang semakin luas dan kondusivitas wilayah yang makin mantap serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan, dengan prioritas :

1. Penanggulangan kemiskinan, fokus pada :
 - a. Penyediaan *basic life acces* untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan : akses rumah layak, layanan akses dasar menyeluruh air bersih, sanitasi, listrik; penanganan kawasan pemukiman kumuh; akses pendidikan, kesehatan dan pangan; perlindungan sosial bagi masyarakat dan fasilitasi kepemilikan sertifikat lahan.
 - b. Penguatan *sustainable life hood* melalui : fasilitasi akses terhadap aset, modal, manajemen dan pasar; peningkatan start up wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - c. Penguatan basis data, basis spasial berbasis komunitas dan pendampingan yang kontinyu serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan.
2. Penguatan daya saing ekonomi daerah, fokus pada :

- a. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan melalui peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; pembelian bibit, benih, pupuk; asuransi petani; penyediaan alsintan; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan perkebunan; pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok (*corporate farming*).
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui : peningkatan keterampilan nelayan; penyediaan prasarana dan sarana perikanan tangkap (kapal/TPI); pemberian benih dan pakan ikan; dan penyediaan lahan budidaya perikanan.
- c. Optimalisasi potensi sumber daya hutan melalui : peningkatan kualitas tata kelola kehutanan; penerapan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu); peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha kehutanan (hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan rakyat); penyediaan bibit tanaman hutan; peningkatan keterampilan masyarakat dalam pengolahan hasil hutan serta pemanfaatan sumber daya hutan non kayu.
- d. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil mikro dan menengah melalui peningkatan nilai tambah diversifikasi produk, mengembangkan inovasi teknologi, memfasilitasi akses modal dan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi; pengembangan industri besar dengan pengembangan kawasan industri serta kemitraan UMKM dan industri besar; peningkatan infrastruktur jaringan distribusi perdagangan antar provinsi di Indonesia serta fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM.
- e. Mendorong pariwisata berbasis masyarakat melalui : perbaikan prasarana dan sarana serta manajemen pengelolaan daerah wisata dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata.

- f. Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui : pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; kebijakan investasi padat karya; pengembangan digital *investment promotion*; pengembangan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota; mendorong perwujudan investasi hijau.

3. Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM, fokus pada :

- a. Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui : peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan; pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude*, pengembangan *learning culture*, penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi standar nasional dan/atau standar internasional; meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik; meningkatkan manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan, mengoptimasi peran lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam mendukung pengembangan pendidikan; mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan; pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan dan peningkatan pengembangan pendidikan inklusi.
- b. Meningkatkan upaya promotif dan preventif lebih diprioritaskan disamping tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi kesehatan serta peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air sembarangan).
- c. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan berdaya saing tinggi melalui : penguatan program pendidikan link and match berbasis demand-driven; mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); sertifikasi berstandar nasional dan/atau internasional bagi lulusan pendidikan vokasi; memperluas akses informasi pendidikan kejuruan dan vokasi dalam

mendukung demand tenaga kerja ke depan; mendorong kebijakan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru; mengembangkan budaya inovatif dan mendorong kebijakan afirmatif untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal.

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup dan Penganggulangan Bencana, fokus pada :

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui : pengelolaan hutan dan lahan dengan rehabilitasi hutan dan lahan, perhutanan sosial, konservasi daerah hulu dan tangkapan air; pengembangan kelembagaan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan perkuatan LMDH; Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan Minerba dengan reklamsi lahan bekas pertambangan, perijinan dan pengawasan usaha pertambangan; pengendalian pencemaran tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, terumbu karang dan pesisir; pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, tanah dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

5. Ketahanan pangan dan energi, fokus pada :

- a. Mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dan daya saing pangan melalui : peningkatan ketersediaan pangan dengan mempertahankan luasan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, meningkatkan kewirausahaan, manajemen dan bisnis petani serta distribusi pangan; peningkatan aksesibilitas pangan dengan

menjaga stabilitas harga dan pasokan; peningkatan konsumsi pangan yang bergizi, beragam dan berimbang dengan pengembangan diversifikasi pangan, membangun kesadaran masyarakat terhadap pangan beragam, serta peningkatan kuantitas, nilai tambah dan keragaman produk pangan; peningkatan mutu pangan yang berkualitas serta memenuhi standar, sertifikat aman dan layak pasar; pengembangan dan penerapan inovasi teknologi paska panen.

- b. Mewujudkan pemerataan akses energi dan listrik melalui penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan dengan meningkatkan koordinasi dengan PLN sebagai penyedia jaringan listrik dan pengembangan listrik perdesaan; pengembangan listrik murah dan hemat; pengembangan energi gbaru terbarukan dengan pemanfaatan biogas, biomass, gas rawa, mikro hidro dan tenaga surya.

6. Kesenjangan Wilayah, fokus pada :

- a. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui : peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan – jembatan yang menghubungkan pantura – pansela dan daerah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas regional, perkotaan p perdesaan; peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal, pelabuhan, bandara dan stasiun).
- b. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah; peningkatan jaringan air minum layak berbasis kawasan dan masyarakat; meningkatkan kualitas dan kapasitas pasar, pusat perdagangan dan pusat jasa lainnya.
- c. Menciptakan pusat-pusat ppertumbuhan baru di wilayah selatan, barat dan timur yang diwujudkan dengan penetapan kawasan peruntukan industri baru wewenang provinsi dalam RTRWP dan dukungan dana untuk pengembangannya serta meningkatkan peran dan fungsi perkotaan yang semula PKL menjadi PKWp.
- d. Mengoptimalkan potensi kelautan dengan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

7. Tata Kelola Pemerintahan, fokus pada :

- a. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
- b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin dan penataan ASN;
- c. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya-upaya *dean and dear government* dari menerapkan "keperantaraan dan *enterpreuneur*" dalam tata kelola pemerintahan.
- d. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Jawa Tengah.

C. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 diarahkan untuk Pemantapan Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan"

Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 ditujukan untuk:

1. Kemiskinan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan serta pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan prioritas pada :
 - a. Peningkatan kualitas data sasaran program penanggulangan kemiskinan melalui upaya perbaikan basis data terpadu.
 - b. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi serta pangan dan gizi yang difokuskan pada desa/kecamatan miskin dengan sasaran berdasarkan basis data terpadu.
 - c. Pemberdayaan masyarakat miskin dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan melalui pelatihan ketrampilan bagi rumah tangga miskin desil 3 dan 4 dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal.
 - d. Peningkatan koordinasi dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sehingga terwujud pembangunan yang inklusif melalui upaya pelibatan semua komponen termasuk masyarakat dan dunia usaha, dengan fokus di desa/kecamatan miskin.
2. Daya Saing Ekonomi
 - a. Revitalisasi pertanian dalam arti luas yang berorientasi pada peningkatan hasil, pengolahan pasca produksi untuk nilai tambah, peningkatan kesejahteraan petani serta keamanan pangan.
 - b. Penguatan kelembagaan ekonomi lokal berbasis kerakyatan di sektor riil dalam bentuk klaster, OVOP/ODOP dan industri prioritas.
 - c. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk dari hulu ke hilir.
 - d. Pengembangan jaringan pemasaran yang efektif dan efisien.
 - e. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas yang mendukung aktifitas perekonomian.
 - f. Pengembangan destinasi pariwisata yang berbasis pada desa wisata didukung oleh ekonomi kreatif.

- g. Perbaikan iklim investasi yang kondusif melalui insentif dan kemudahan perijinan.

3. Tata Kelola Pemerintahan

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b. Penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi yang efektif dan efisien.
- d. Penguatan sistem informasi manajemen pemerintah yang berprinsip pada transparansi dan keterbukaan informasi publik.
- e. Penguatan upaya pemberantasan praktek KKN di lingkungan birokrasi melalui penciptaan dan pengembangan zona integritas.
- f. Peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis efisiensi yang transparan dan akuntabel.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia

- a. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter.
- b. Kemudahan akses pendidikan dan keterjangkauan biaya pendidikan terutama bagi masyarakat miskin.
- c. Pengembangan layanan pendidikan inklusi.
- d. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan sarana prasarana pendidikan dasar di daerah perbatasan kabupaten dalam rangka pemerataan akses serta mutu pendidikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sekolah ramah anak.
- e. Peningkatan upaya kesehatan lingkungan berbasis masyarakat.
- f. Peningkatan dan keberpihakan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- g. Penanganan kasus gizi masyarakat secara lebih komprehensif sesuai kebutuhan.
- h. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui aksi nyata dalam mendukung gerakan masyarakat sehat (Germas).

- i. Penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui upaya preventif, promotif dan kuratif serta pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di layanan kesehatan dasar, terutama di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi.
- j. Peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai standar bursa kerja.
- k. Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pelatihan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan layanan dan pengelolaan persampahan (fokus pada TPA dan TPST).
- b. Peningkatan upaya konservasi lingkungan hidup dengan pelibatan masyarakat dan swasta.
- c. Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- d. Pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan bencana (pencegahan, penanggulangan, pengurangan dampak bencana dan pasca bencana).
- e. Peningkatan akses sanitasi dan air minum layak bagi masyarakat.
- f. Percepatan penanganan kawasan kumuh.
- g. Pengurangan pencemaran lingkungan.
- h. Pelestarian sumber-sumber air berbasis kearifan lokal

6. Kesenjangan Wilayah

- a. Pemerataan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur.
- b. Mendorong pusat-pusat pertumbuhan yang dapat meningkatkan kemudahan layanan barang dan jasa.

